

PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



disperakim jateng



disperakimprovjateng



disperakimjtg



<https://disperakim.jatengprov.go.id/>



DESK PENCERMATAN DIP DAN DIK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

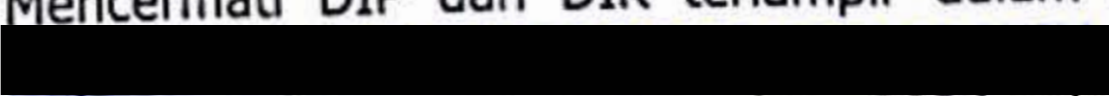
NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Kepala Bidang di Lingkungan Disperakim Prov. Jateng
2. Kepala Subbag di Lingkungan Sekretariat Disperakim Prov. Jateng
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Melalui : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 21 Februari 2024
Nomor : 085/SEK-UMPEG/II/2024
Perihal : Desk Pencermatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 487.22/136 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 11 Januari 2024, bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyampaikan DIP DIK, yang harus diserahkan ke Dinas Kominfo Prov. Jateng paling lambat Minggu ke-I bulan April 2024, sehubungan dengan hal tersebut akan dilaksanakan Desk Pencermatan DIP dan DIK dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
Waktu :

Bidang	Jam
Keterpaduan PKP	08.30-09.00
Kawasan Permukiman	09.00-09.30
Pertanahan	09.30-10.00
Perumahan	10.00-10.30
Sekretariat	10.30-11.00

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Kecil (Ruang Rapat PPID)
Catatan : 1. Mencermati DIP dan DIK terlampir dalam link  dan mempersiapkan usulan DIK tahun 2024 sebagai persiapan Uji Konsekuensi Tahun 2024
2. Mohon dapat melengkapi data-data terlampir dan diserahkan pada saat Desk (Soft file)

Mengingat urgensi kegiatan tersebut, Sekretaris dan para Kepala Bidang agar menugaskan Sub Koordinator dan pelaksana teknis untuk hadir dan mengikuti pencermatan sesuai jadwal.

Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

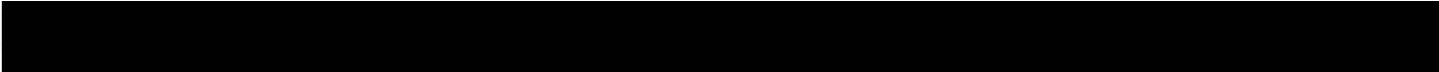
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
selaku
ATASAN PPID PELAKSANA

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi Tentang Profil Badan Publik							
a.	Informasi tentang kedudukan atau domisil beserta alamat lengkap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ; - Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-88, Kompleks PRPP, Semarang - Telepon/ fax : 024 – 7600247, 7600533, 7603300, 7606301 - Email : dsperakum@jatsigprov.go.id - Letak Kantor Dsperakum Jateng pada Maps dan barcode Maps Dsperakum Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	VI SI : "MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI" TE TEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI MISI : 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas akses ke Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4. Memberikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mendinilai lingkungan. - serta memusi mengenai visi misi PPID	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama berlaku



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :

DRAFT
Diambil dari DIK 2023

Pada hari ini, tanggal **Maret 2024** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran)	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau <i>basic design</i> ; 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Besaran nilai santunan	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial masyarakat; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial masyarakat.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur tentang pemberian santunan penanganann dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung Informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial masyarakat telah diselesaikan serta mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (identitas penyedia jasa)	- Pasal 15 huruf c, dan pasal 17 huruf b,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Karena pada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum) 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	1. menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu 2. melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di Audit
5	Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian	Sampai dengan diumumkannya pemenang

Lampiran

Sekretariat

No	Data
1	LPPD
2	DIP
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tahun 2023
5	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
6	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
7	Informasi Ketenagakerjaan
8	Maklumat Pelayanan

Lampiran

Bidang Perumahan

No	Data
1	Naskah Akademis (Jika ada)
2	Rancangan/draft Peraturan (Jika ada)
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tahun 2023
5	Daftar Penelitian (Jika ada)
6	Rekapitulasi Penerima Bantuan RTLH 2023

Lampiran

Bidang Kawasan

No	Data
1	Naskah Akademis (Jika ada)
2	Rancangan/draft Peraturan (Jika ada)
3	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 Lomba Hari Habitat Juara 1 dan 2 (Tahap Perencanaan, Pemilihan, Pelaksanaan)
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tahun 2023
5	Daftar Penelitian (Jika ada)
6	Daftar Luas Kawasan Kumuh yang di tangani

Lampiran

Bidang keterpaduan

No	Data
1	Naskah Akademis (Jika ada)
2	Renstra 2024-2026
2	Rancangan/draft Peraturan (Jika ada)
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tahun 2023
5	Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Daftar Penelitian (Jika ada)

Lampiran

Bidang pertanahan

No	Data
1	Naskah Akademis (Jika ada)
2	Rancangan/draft Peraturan (Jika ada)
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tahun 2023
5	Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2023
6	Daftar Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2023
7	Syarat-syarat Perizinan, Izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukung nya dan laporan penataan izin yang diberikan

DOKUMENTASI DESK DIP





PENYAMPAIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN UJI KONSEKUENSI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Maret 2024

Nomor : 481.6 / 1163
Sifat : -
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Penyampaian Daftar Informasi
Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi
PPID Pelaksana Disperakim Prov.
Jateng Tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Statistik
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :
487.22/136 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Peningkatan Pelayanan Data dan
Keterbukaan Informasi Publik, terlampir kami sampaikan Daftar Informasi Publik
(DIP) dan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Pelaksana Disperakim
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


IT. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 021. / III / 2024

T e n t a n g

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

15. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/I/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 487.22/136 tanggal 11 Januari 2024 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 044/III/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU**

ATASAN PPID PELAKSANA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi Tentang Profil Badan Publik							
a.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ; - Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Kompleks PRPP, Semarang - Telepon/ fax : 024 – 7600247, 7608533, 7603586, 7608581 - Email : disperakim@jatengprov.go.id - Letak Kantor Disperakim Jateng pada Maps dan barcode Maps Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	VISI : "MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI" TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI MISI : 1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. - serta memuat mengenai visi misi PPID	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Tugas, Fungsi	1. TUGAS POKOK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 2. FUNGSI - perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman - pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. (Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disperakim Prov Jateng)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
d.	Struktur Organisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Dinas tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi Sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Kepala Bidang Perumahan; d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman; e. Kepala Bidang Pertanahan; f. Kepala Bidang Keterpaduan PKP.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	Tujuan : Meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman yang layak huni bagi masyarakat, Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan Sasaran : Meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah Strategi : Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (APBD Provinsi Jawa Tengah 15.000/tahun), Fasilitas Alternatif Pembiayaan (APBN, APBD Kab/Kota, CSR, Baznas), Padat Karya, Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, dll Arah Kebijakan : Dukungan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Miskin), Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, MBR dan Non MBR, Penanganan Pasca Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, dll	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Profil singkat pimpinan/ pejabat struktural Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Nama : Ir. Arief Djatmiko, MA NIP :19660801 199603 1 004 Sekretaris : Nama : Nova Adiwidanto, S.Hut,M.Si NIP : 19731113 199803 1 003 Kepala Bidang Perumahan : Nama : Sri Wiharnanto, ST, MT NIP : 19670207 199003 1 005 Kepala Bidang Kawasan : Nama : Effendy Judy Arianto, ST,MT NIP :19700225 199703 1 003 Kepala Bidang Keterpaduan : Nama : Arif Sugeng Haryanto, ST NIP : 19731120 200501 1 006 Kepala Bidang Pertanahan Nama : Ilham Pribadi, SH, MH NIP : 19841201 200903 1 005 serta memuat profil Sub Koordinator di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
g.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Pegawai ASN Disperakim Prov Jateng Tahun 2024 sebanyak 79 orang dengan rincian jabatan sebagai berikut : Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 5 orang, Eselon IV berjumlah 3 orang, JFT Ahli Madya berjumlah 0, JFT Ahli Muda berjumlah 8 orang, JFU berjumlah 42 orang. serta Non ASN Disperakim Prov. Jateng berjumlah 51 orang	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
h.	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas dan Para Pejabat Struktural Disperakim Prov Jateng Tahun Verifikasi 2023. Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
i.	LHKASN	Daftar LHKASN dari para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yang memuat mengenai Nama, Nip, satker, unit kerja, SKPD, Jenis Laporan, serta keterangan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik							
a.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Anggaran di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2024 Disperakim memiliki : 8 (Delapan) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan, 61 (Enam Puluh Satu) Sub Kegiatan • Bidang Sekretariat : 1 Program, 8 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan • Bidang Perumahan : 1 Program, 4 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan • Bidang Kawasan : 2 Program, 4 Kegiatan, 8 Sub Kegiatan • Bidang Pertanahan : 3 Program, 3 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan • Bidang Keterpaduan : 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
b.	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Memuat mengenai Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang memuat Nama, Bidang serta Kegiatan/sub kegiatan. Dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan. Terdiri dari Komposisi Anggaran, Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari Target Fisik, Target Keuangan, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan, Deviasi Fisik, Deviasi Keuangan, Indikator Kinerja Program yang memuat sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Jadwal Pelaksanaan Target Fisik dan Rencana Pengeluaran Anggaran di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) yang tercantum dalam RKO yang telah disusun, meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan berdasarkan program, kegiatan, di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
e.	Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi Sumber dan Jumlah	Memuat mengenai Sumber Dana yang berasal dari APBD dan Besar Anggaran Program Kegiatan di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2024 Yang terdiri dari : 1. Program Pengembangan Perumahan : Rp. 34.917.000.000 2. Program Kawasan Permukiman : Rp. 3.828.000.000 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : Rp. 1.725.000.000 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp. 1.194.000.000 5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Rp. 400.000.000 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan : Rp. 600.000.000 7. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Rp. 590.000.000 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : Rp. 21.971.353.000	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
f.	Ringkasan Informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dan sedang dijalankan di Tahun 2024	berisi mengenai progres pelaksanaan APBD yang memuat mengenai komposisi Anggaran TA 2024, Progres realisasi APBD dan Capaian Kinerja, realisasi fisik dan keuangan Disperakim Provinsi JawaTengah, Pelaporan Progres Pengadaan Barang dan Jasa, serta pelaporan pelayanan informasi publik dan sosial media	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
g.	Naskah Akademis	Rancangan Peraturan sebelum disahkan menjadi suatu kebijakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 tidak ada agenda penyusunan produk hukum/kebijakan hukum yang membutuhkan dokumen Naskah Akademis.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Memuat mengenai Informasi Program, Kegiatan, Pagu, Tolak Ukur Kinerja serta Target Kinerja yang ada di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keternak	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
b.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP 2023)	Memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperakim pada Tahun 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Disperakim telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Disperakim. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
c.	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023	Memuat Layanan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID dalam hal keterbukaan melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti twitter (@disperakimjtg), facebook (disperakim provinsi jawa tengah), instagram (@disperakimprovjateng) serta youtube (Disperakim Jateng).	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2025)	Memuat Rencana Kinerja Tahunan Disperakim tahun 2025 yang memuat mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang berisikan Tujuan dan Sasaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
e.	Perjanjian Kinerja (PK 2024)	Dokumen Perjanjian Kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan Atasan langsung. Berisikan mengenai Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja serta target dari pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program dan Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
f.	Rencana Kerja (Renja 2024)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2024. Renja ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Disperakim Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
g.	Kerangka Acuan Kerja (KAK 2024)	Dokumen Kerangka Acuan Kerja pada kegiatan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 yang memuat mengenai : 1.Urusan Pemerintahan ; 2. Bidang/Seksi ; 3.Program,Kegiatan ; 4.Sub Kegiatan ; 5.Sasaran Sub Kegiatan ; 6.Output Sub Kegiatan ; 7.Latar Belakang ; 8.Lingkup Kegiatan ; 9.Komponen Kegiatan; 10.Anggaran Sub Kegiatan ; 11.Rincian Kegiatan, dan Tahapan Pelaksanaan 12.Penutup	Kepala Bidang / KPA	Kepala Dinas / PA	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
h.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban yang diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2024	Softcopy	3 Tahun
i.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD 2023)	Memuat tentang Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKPD yang di sampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Mendasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Gubernur Kepada Masyarakat, maka Gubernur mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Laporan Realisasi Anggaran 2023	Dokumen yang memuat Laporan Realisasi Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2023 yang terdiri dari Uraian, Anggaran, Realisasi yang berisi mengenai Pendapatan Daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat, lain-lain), Belanja daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dll	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
b.	Ringkasan Neraca Tahun 2023	Dokumen yang memuat Ringkasan Neraca Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2023 yang memuat mengenai Aset lancar (Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pajak daerah, piutang restribusi daerah,piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer antar daerah, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan), investasi jangka panjang, (investasi jangka panjang non permanen, investasi jangka panjang permanen), aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, ekuitas	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku Tahun 2023	memuat mengenai Laporan Arus Kas Disperakim Prov. Jateng Tahun 2023 serta memuat penjelasan Pos-pos laporan keuangan yang berisi : Pos-pos pendapatan (pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan retribusi jasa usaha), Pos-pos Belanja (Belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal), Pos-pos neraca (Aset, aset lancar, kas, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, persediaan, belanja dibayar dimuka), Aset Tetap (Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan) Aset tetap lainnya (Konstrukdi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan), Kewajiban (kewajiban jangka pendek, hutang jangka pendek pihak ketiga, hutang perhitungan pihak ketiga, pendapatn di terima d muka, hutang belanja), Ekuitas, Pos-pos laporan operasional (pendapatan-LO, pendapata asli daerah, pendapatn retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah), Beban	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
d.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA 2024)	Dokumen yang memuat Rencana Kerja dan Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2024 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Memuat mengenai Program, Kegiatan, sub Kegiatan, anggaran di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2024)	Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2024 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
f.	Aset dan Inventaris 2023	Memuat mengenai Mutasi Aset Tetap, Mutasi Aset lainnya, Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin, Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam Pengerjaan	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
g.	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	memuat mengenai laporan APBD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan uraian, target, realisasi, deviasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah yang tercantum dalam hasil rapat koordinasi pengendalian tingkat perangkat daerah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
h.	Laporan Perubahan Ekuitas	memuat mengenai Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RK PPKD, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, Ekuitas Akhir di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
i.	Laporan Operasional	memuat mengenai Pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, beban operasional (beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban lain-lain), Beban Transfer, Surplus non operasional, Defisit non operasional, Pos Luar biasa, beban luar biasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
j.	Berita Acara Stock Opname	memuat mengenai berita acara pemeriksaan / stock opname barang yang terdiri dari identitas pemeriksa dan yang diperiksa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan (Stock Opname) serta rincian stok persediaan	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun
5. Ringkasan laporan akses informasi publik							
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima	Jumlah Permohonan Informasi yang diterima, dikabulkan dan ditolak pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada Disperakim Provinsi Jawa tengah Tahun 2023 melalui web ppid, email ppid, permohonan langsung, Laporgub, Twiter, Facebook, Instagram.	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	Waktu yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021. 1.Pasal 31 ayat (2) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik 2.Pasal 31 ayat (3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap 3.Pasal 33 ayat (3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik 4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dalam hal permintaan informasi publik ditolak. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik diterima. 5. Pasal 36 ayat (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah Rekap permohonan informasi publik sepanjang tahun 2023 berupa matrik bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jumlah Permohonan Informasi, Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, Permohonan Informasi Publik yang ditolak, alasan penolakannya serta grafik permohonan informasi	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Dinas Perakim Prov.Jateng berhak menolak Permohonan Informasi Publik bilamana : 1.Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau Perundang-undangan lainnya 2.Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 3.Dinas Perakim Prov.Jateng tidak menguasai/memiliki/menyimpan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 4.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan pada tahun 2023 terdapat permintaan informasi yang ditolak karena ada yang merupakan bukan kewenangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan ada yang dikarenakan tidak dibawah penguasaan Disperakim	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Hasil Penanganan Pengaduan	Memuat Register Permohonan Informasi/Pengaduan yang masuk di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2023. Berisikan Rekap Informasi yang diminta, Tujuan Penggunaan Informasi, Status Informasi, Bentuk Informasi yang dikuasai, Jenis Permohonan, Keputusan PPID, Alasan Penolakan, Hari dan Tanggal, serta Biaya dan Cara Pembayaran	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Penyerahan Laporan Tahunan 2023	memuat mengenai bukti penyerahan laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang terdiri dari laporan tahunan layanan informasi publik dan register permohonan informasi publik tahun 2023	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
6	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi, serta penyelesaian sengketa informasi						
a.	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, serta Tata Cara Pengajuan Keberatan serta Proses Penyelesaian sengketa informasi	memuat mengenai : 1. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik 2. Alur permohonan informasi publik 3. Tata cara pengajuan keberatan atas informasi 4. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik 5. Formulir permohonan informasi publik	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Tarif dan Biaya	memuat mengenai standar biaya perolehan informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis, sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar kantor Disperakim Prov. Jateng	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang						
	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	memuat mengenai Standar Operasional (SOP) Pengaduan dari masyarakat dan wistle blower system	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
8	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa						
	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	RUP Disperakim Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/login , yang isinya terdiri dari : No, Nama Paket, Pagu, Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP, serta waktu pemilihan. Dari Bidang : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Pejabat Pengadaan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman proses pengadaan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari kode, Nama Paket, Nama Perangkat Daerah, Tahapan, serta HPS dapat dilihat pada https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang	Pejabat Pengadaan	Kepala Bidang(KPA) / Kepala Dinas (PA)	2024	Softcopy	Selama Berlaku
	Mengumumkan Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Memuat mengenai informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 yang terdiri dari 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat	Pejabat Pengadaan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
9	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						
	prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai dengan SOP yang berlaku yang terdiri dari : 1. Menyalakan Sirine sebagai tanda Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah 2. Ikuti Jalur Evakuasi yang sudah di tentukan 3. Keluar dari Gedung Kantor menuju Titik Kumpul serta dilengkapi video simulasi evakuasi saat terjadi gempa yang terdapat pada youtube Disperakim Jateng serta memuat mengenai Prosedur Penanganan Gempa Bumi, Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan						
	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. Meningat pada nomor 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
	Pergub Nomor 61 Tahun 2016	Memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan Pasal 3 yang berisi Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perakim mempunyai 6 (enam) Fungsi	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
	Rancangan/Draft peraturan	Rancangan/draft peraturan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang memuat mengenai Draft petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2039	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
	Perda Nomor 7 Tahun 2019	memuat tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah tahun 2019-2039	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
B. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA							
1.	Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	memuat mengenai informasi langkah-langkah prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat dimulai dari menyalakan sirine hingga keluar dari gedung kantor menuju titik kumpul	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
2.	Prosedur Penanganan Gempa Bumi	memuat mengenai informasi langkah-langkah penanganan jika terjadi gempa bumi dimulai dari bila terdapat gedung rusak/robok segera mengaktifkan sistem evakuasi di dalam gedung hingga mengevakuasi korban terluka parah keluar gedung dan mengirimnya ke rumah sakit terdekat	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
3.	Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran	memuat mengenai informasi langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran langkah pertama yang harus diambil yaitu tetap tenang dan jangan panik dan segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari hingga yang terakhir segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
C. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	Daftar Informasi Publik (DIP)						
a.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dapat dilihat pada website PPID Disperakim Prov Jateng : http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/dip .. Dalam DIP tersebut memuat terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Dan informasi Serta Merta. Dalam informasi berkala antara lain memuat informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, Ringkasan Laporan Keuangan, dll. sedangkan untuk Informasi Setiap saat antara lain memuat DIP, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan badan publik, dll. dan untuk Informasi Serta Merta yaitu memuat informasi mengenai prosedur penanganan keadaan bencana	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
2	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan						
a	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. serta berisi mengenai Pergub No.61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Perda Nomor 7 Tahun 2019	memuat mengenai peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2039	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan						
a	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan	memuat peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 14 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024, peraturan gubernur jawa tengah nomo 34 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dll	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Profil Kepegawaian	Profil lengkap pegawai dan data kepegawaian dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah tahun 2024 yang memuat mengenai grafik jumlah pegawai ASN, Rekap jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, rekap jumlah pegawai ASN dan Non ASN, Rekap Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/ Jabatan Kepegawaian	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
c	Daftar LHKASN yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang	Daftar LHKASN dari para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yang memuat mengenai Nama, Nip, satker, unitkerja, SKPD, tanggal lapor, serta keterangan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
d	Anggaran Secara umum/khusus serta laporan keuangannya	memuat mengenai anggaran tahun anggaran 2024 dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memuat uraian, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, jumlah dan Rencana realisasi penerimaan dan penarikan perbulan serta laporan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
e	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	memuat mengenai Diagram Komposisi Anggaran 2024, Statistik Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Dinas, Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan, Bidang Pertanahan, Bidang Keterpaduan PKP, Statistik Pelayanan Informasi Publik dan Media Sosial yang terdiri dari Rekap Kanal Aduan Laporgub, Reporting Lapor.go.id, Konten Media Sosial, Konten Berita Web Dinas, Laporan Akumulatif Followers dan Subscribers Medsos, Presentase Hasil Survey Kepuasan Website	Kepala Sub Bag Proqram	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga						
a	Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	memuat mengenai dokumen kontrak yang ada di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Daftar Perjanjian Kerjasama	memuat mengenai Mou atau nota kerjasama yang ada di Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya						
a	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	memuat rekap Agenda Kegiatan pimpinan satuan kerja di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang memuat No surat, perihal, jenis surat, pengirim, penerima, tanggal surat, pada tahun 2024	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
6	Data Perbendaharaan atau inventaris						
a	Data perbendaharaan atau inventaris	Memuat mengenai kartu inventaris barang (KIB) A. Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kontruksi dalam	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
7	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik						
a	Rencana strategis	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban yang diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	3 Tahun
b	Rencana Kerja (Renja 2024)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2024. Renja ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Disperakim Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Agenda kerja Dinas						
a	Agenda kerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Memuat Agenda Kerja Pimpinan satuan kerja yang terdiri dari tanggal pelaksanaan, Acara Kegiatan, Lokasi Pelaksanaan dan Bidang yang melaksanakan pada Tahun 2024	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
9	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan						
a	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Memuat Sarana dan Prasarana pendukung layanan Informasi Publik berupa Meja Layanan Informasi, Komputer, LCD Pelayanan Informasi, Smart TV Kegiatan Kedinasan, ada di dalam Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
10	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran						
a	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Memuat jumlah jenis pelanggaran yang ditemukan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan pengawasan internal serta laporan penindakannya yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya	Memuat Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
11	Daftar Hasil Penelitian						
a	Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	memuat mengenai penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari bidang kawasan permukiman mengenai kajian penanganan kawasan permukiman liar di provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka						
a	Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya alur permintaan informasi publik untuk masyarakat, pernyataan keberatan dan penyelesaian sengketa di website Disperakim. Dalam mengajukan permohonan informasi maka masyarakat dapat mengikuti alur dari permohonan informasi tersebut.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka	Kegiatan - kegiatan Kedinasan dari Kepala Dinas serta para Pejabat Publik yang disampaikan melalui berita di website Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan media sosial Disperakim Jawa Tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
13	Informasi lainnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah						
a	Informasi tentang Ketenagakerjaan	memuat informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
b	Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2023	presentase surat keputusan penetapan tanah lokasi, jumlah sk penetapan lokasi yang diterbitkan yang memuat mengenai Penlok, no/tanggal terbit	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
c	Daftar Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2023	Rekapitulasi Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2023 yang memuat mengenai permasalahan/aduan, lokasi, serta bulan dan tahun terfasilitasi	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
d	Rekapitulasi Penerima Bantuan RTLH 2023	Rekapitulasi Penerima Bantuan RTLH 2023 yang memuat mengenai jumlah unit rumah korban bencana yang di tangani yang terdiri dari penyediaan rumah (PB) dan Rehabilitasi rumah (PK) , jumlah unit peningkatan kualitas RTLH yang terdiri dari kabupaten, total jumlah rumah, total jumlah desa	Kepala Bidang Perumahan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
e	Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Memuat Mengenai Buku Data Tahun 2023, pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi.	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
f.	Informasi Disabilitas	memuat mengenai informasi disabilitas yang terdiri dari informasi terkait penyanggah disabilitas yang di tempel pada papan pengumuman, informasi terkait akses masuk Disperakim yang dilengkapi dengan Ramp sehingga ramah terhadap penyanggah disabilitas, informasi akses menuju ruangan yang dilengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyanggah disabilitas, Informasi Akses menuju kamar mandi di lengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyanggah disabilitas, tersedia Hand Rail di dalam Kamar Mandi sehingga ramah terhadap penyanggah disabilitas serta sop pelayanan informasi bagi disabilitas	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
g.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	Tidak ada perijinan yang diampu oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Data tidak tersedia karena bukan Tupoksi Disperakim dan ditangani oleh OPD lain	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku
h.	SOP PPID Disperakim Prov. Jateng	memuat mengenai SOP permintaan Informasi, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pendokumentasian Informasi, SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik, SOP Pengaduan dari masyarakat, SOP Fasilitas Keberatan, dll	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2024	Softcopy	Selama Berlaku
i	Daftar Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	memuat mengenai presentasi luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani, jumlah luasan kawasan permukiman kumuh > 10-15 ha, jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh, presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU, jumlah pemukiman yang terfasilitasi	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	2024	Softcopy	Selama Berlaku

MENYETUJUI :

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku Atasan PPID Pelaksana





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 022 / III / 2024

T e n t a n g

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 15. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/I/2024 tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 022 / III Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 022 / III / 2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 045/III/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

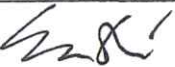
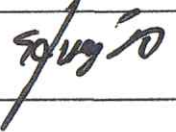
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 022 / III / 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **8 Maret 2024** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai : 1.Data kepemilikan tanah; 2.Perkiraan nilai tanah; 3.Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik pembangunan; 4.Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah.	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; -Pasal 35 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1.Akan membuka Data Pribadi; 2.Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.	1.Melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah;Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran; 2.Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	1.Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2.Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak; 2. Besaran nilai santunan.	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -Pasal 35 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1.Akan membuka Data Pribadi yang bersifat rahasia 2.Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 3. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 4. Berpotensi menimbulkan kerawanan sosial	1. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 3. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	1.Data Pribadi Penerima santunan : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2.Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai.
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses.	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat.	Sampai dengan penetapan pemenang.
4	Rekapitulasi Penilaian Lomba Hari Habitat.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian.	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian.	Sampai ada izin tertulis dari semua anggota Tim Juri yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Ir.Arief Djatrniko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		2 
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Sri Wiharnanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		4 
5	Ilham Pribadi, SH, MH	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		6 
7	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Program selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7	
8	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah		8 
9	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	9	
10	Dr. Nurul Hasfi, MA	Lektor Kepala (Akademisi)	Universitas Diponegoro		10 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

